



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 3
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 PSW.5520, (021) 3864786 FAKSIMIL (021) 34834821
SITUS www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S - 3468 /PB.4/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Permintaan Data Lembaga Keuangan Bukan Bank
(LKBB) di lingkup Provinsi

16 April 2018

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah
Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, Ditjen Perbendaharaan melalui BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menyalurkan pembiayaan untuk usaha mikro dengan plafon pinjaman di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Sampai dengan triwulan I tahun 2018, BLU PIP telah bekerja sama dengan 3 (tiga) LKBB yaitu PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Bahana Artha Ventura yang bertindak sebagai Penyalur Utama Pembiayaan UMi dan 13 Koperasi sebagai Penyalur Linkage. Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018, Pembiayaan UMi telah berhasil menjangkau 378.552 usaha mikro dengan total nilai penyaluran sebesar Rp994 Miliar.
3. Pada RKP tahun 2019 yang disusun oleh Bappenas, Pembiayaan UMi merupakan salah satu program prioritas nasional dengan topik "Perluasan Pembiayaan UMi". Dalam rangka mendukung perluasan penyaluran Pembiayaan UMi tersebut, diperlukan data LKBB di seluruh Indonesia yang memiliki potensi untuk menjadi penyalur utama maupun penyalur linkage Pembiayaan UMi.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan daftar LKBB yang berada di lingkup wilayah kerja Saudara sesuai dengan format terlampir.
5. Dalam pengumpulan data tersebut, Saudara dapat bekerja sama dengan kantor perwakilan OJK, kantor perwakilan Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, maupun institusi terkait lainnya.
6. Mengingat urgensi pengumpulan data tersebut, kami harapkan data tersebut dapat disampaikan terlebih dahulu kepada kami melalui alamat email kredit.program@gmail.com paling lambat tanggal 30 April 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur,

Ari Wahyuni
NIP 196611091990102001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan

DAFTAR LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)

PROVINSI.....*

No	Jenis LKBB	Nama LKBB	Alamat dan Nomor Telepon	Jenis Usaha	Tanggal Pendirian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
...						
dst						

Petunjuk Pengisian:

* Isi dengan nama provinsi

(1) Isi dengan nomor urut

(2) Isi dengan jenis LKBB yaitu:

(pilih salah satu)

- Koperasi
- Lembaga Keuangan Mikro;
- Lembaga Perkreditan Rakyat yang diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat; dan
- Lembaga Keuangan Pembiayaan yang dimiliki oleh Pemda
- Lembaga Keuangan Lainnya yang bergerak di bidang Pembiayaan UMKM (contoh: Perusahaan Modal Ventura, perusahaan *fin-tech*)

(3) Isi dengan nama LKBB

(4) Isi dengan alamat dan nomor telepon LKBB

(5) Isi dengan jenis usaha lkbb meliputi:

(dapat lebih dari satu)

- Simpan pinjam
- Serba Usaha
- Produksi
- Konsumsi

(6) Diisi dengan tanggal pendirian. Apabila ada, dapat ditambahkan informasi nomor akta pendirian.

(7) Diisi dengan keterangan tambahan lainnya.